

**PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI KONTRAK
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA (STUDI KASUS
PUTUSAN NO. 33/PDT.G/2015/PN.JKT.PST.)**

Raymon Budi Hermanto

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk memahami mekanisme penyelesaian sengketa wanprestasi kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta serta untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang harus dilakukan oleh para pihak setelah putusan Majelis Hakim. Pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemprov DKI Jakarta diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015. Pada tahun 2011 telah terjadi perikatan Kontrak antara Kerjasama Operasi (KSO) PT. Buminata Aji Perkasa, PT. Tunggal Jaya Satya dan PT. Ruhaak Phala Industri dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Pemeliharaan Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta. Dalam pelaksanaannya terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh pihak KSO yaitu waktu pelaksanaan penyelesaian pekerjaan yang telah disepakati dalam Kontrak tidak tercapai sebagaimana yang telah ditetapkan, sehingga PPK memberikan denda dan saksi sesuai klausul pada Kontrak. Jenis penelitian pada penulisan ini adalah penelitian hukum yuridis normatif yang bersifat kualitatif. Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Untuk teknik pengumpulan data dilakukan secara data studi dokumen atau bahan kepustakaan, nantinya data diolah dan dianalisa secara kualitatif. Penelitian ini di dukung pula dengan teori-teori hukum seperti *Theories of contractual obligation*, Teori Keadilan, dan Teori Kepastian Hukum.

Kata Kunci : Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Kontrak, Sengketa

**SETTLEMENT OF CONTRACT DISPUTES OF THE
PROCUREMENT OF GOODS/SERVICES OF THE PROVINCIAL
GOVERNMENT OF THE JAKARTA SPECIAL CAPITAL REGION
(CASE STUDY DISTRICT COURT DECISION NUMBER
33/PDT.G/2015/PN.JKT.PST.)**

Raymon Budi Hermanto

Abstract

This study was conducted to understand the mechanism for resolving the dispute over the contract for the Procurement of Goods/Services of the Provincial Government of the Special Capital Region of Jakarta and to find out and analyze the efforts that must be carried out by the parties after the Judge's decision. The implementation of procurement of goods/services within the Jakarta Provincial Government is regulated in the Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 54 of year 2010 which has been amended several times, the latest by Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 4 of year 2015. In 2011 there was a contractual agreement between Joint Operation (PT. Buminata Aji Perkasa, PT. Tunggal Jaya Satya and PT. Ruhaak Phala Industri) with the Commitment Making Officer (CMO) for the Maintenance of Water Resources, Public Works Department, Jakarta Province. In the implementation, there is a default made by the Joint Operation, namely the time for the completion of the work agreed upon in the Contract, not as stated, so that the CMO provides fines and witnesses in accordance with the clause in the Contract. This type of research in this writing is a normative juridical legal research that is qualitative. The nature of the research used is descriptive. For data collection techniques carried out by data study documents or library materials, the data will be processed and analyzed qualitatively. This research is also supported by legal theories such as Theories of contractual obligation, Theory of Justice, and Legal Certainty Theory.

Keyword : Government Procurement of Goods/Services, Contract, Disputes